

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Karim *et.al.*. 2020. *Pengantar Teknologi Informasi*. Yayasan Labuhanbatu Berbagi Gemilang: Labuhanbatu.
- Achmad Ali. 2017. *Menguak Tabir Hukum (Edisi Kedua)*. Kencana: Jakarta.
- Aminuddin Ilmar. 2020. *Memaknai Kepemerintahan Yang Baik (Melalui Penerapan Prinsip Tata Kelola dan Keabsahan Tindakan Pemerintahan)*. Phinatama Media: Makassar.
- , 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana:Jakarta.
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers: Depok.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*. Mirra Buana Media: Yogyakarta.
- Marwan Mas. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia: Bogor
- Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan)*. PT Kanisius : Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Miftah Thoha. 2014. *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Moh Fadli. 2011. *Peraturan Delegasi Di Indonesia*. Universitas Brawijaya Press (UB Press): Malang.
- Muchsin dan fadillah Putra. 2015. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Averroes Press: Malang.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: Nusa Tenggara Barat.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Reza. 2020. *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. CV. Social Politic Genius: Makassar.

Sahya Anggara. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. CV. Pustaka Setia:Bandung

Satjipto Raharjo. 2006. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti:Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. RajaGrafindo Tinggi: Jakarta.

Solichin Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Penyusunan Model- Model Implementasi Kebijakan Publik)*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Desi Fitriyani. 2018. *Keabsahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963*, Skripsi, Program Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Jurnal

Arini Nur Annisa *et.al.*, Government Supervision Of The Rights Fulfillment Of Housed Workers In The Transsition Period, Awang Long Law Review, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda, Volume 5 No.1, November 2022.

Bayu Dwi Anggono, Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 47 No. 1, Januari 2018.

Boby Indra Prayoga, Dinamika Komunikasi Sosial Jasa Angkutan Umum (Online dan Konvensional), Jurnal Nomosleca, Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan, Volume 3 No.2, Oktober 2017.

Cholida Hanum, Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Humani, Universitas Semarang, Volume 10 No.2, November 2020.

- Faris Widiyatmoko, Dinamika Kebijakan Transportasi Online, Journal Of Urban Sociology, Departemen Sosiologi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Volume 1 No.2, Oktober 2018.
- Grace Sharon, Teori Wewenang Dalam Perizinan, Jurnal Justiciabelen, Universitas Muhammadiyah Gresik, Volume 3 No.1, Februari 2021.
- Lutfil Ansori, Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Yuridis, Universitas Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Volume 2 NO.1, Juni 2015.
- Muhammad Huzaini & Deni Setya Bagus, Kedudukan Hukum dan Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor; SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyidikan, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Widya Gama, Volume 4 No.1, Juni 2021.
- Rio Trifo (dkk.), Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Dialektika Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani, Volume 1 No.1, Januari 2019.
- Salahuddin Tunjung Seta, Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Legislasi Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Volume 17 No.2, Juni 2020.
- Solechan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik, Administrative Law & Governance Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 2 No.3, Agustus 2019.
- Surya Mukti Pratama dan Hario Danang Pambudhi, Kedudukan Fungsi dan Pengawasan Peraturan Kebijakan Kepala Daerah dalam Kerangka Sistem Otonomi Daerah, Jurnal Analisis Hukum, Fakultas Hukum & Ilmu Sosial UNDIKNAS, Volume 4 No.1, April 2021.
- Victor Imanuel, Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Refleksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika, Volume 10 No.1, April 2016.

BERITA

["Akibat Hukum – Fakultas Hukum \(untan.ac.id\)"](http://untan.ac.id) Diakses pada tanggal 12 Mei 2023 pada pukul 00.40 Wita.

["Hierarki perundang-undangan di Indonesia \(hukumonline.com\)"](http://hukumonline.com) Diakses pada Tanggal 27 Maret 2023 Pukul 23.24 Wita

[9 Hal Tentang Hari Ojol Makassar Bagi Pegawai Pemkot - Halaman 3 \(detik.com\)](http://detik.com) Diakses pada Tanggal 16 Mei 2023 Pukul 20.53 Wita

["WORKSHOP Peraturan kebijakan di Kementerian PPN bappenas.pdf"](http://bappenas.pdf) diakses pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 01.04

["Surat Edaran, 'Kerikil' dalam Perundang-Undangan \(hukumonline.com\)"](http://hukumonline.com) diakses pada tanggal 18 Mei 2023 pukul 14.03 Wita

["Ojol Day", PNS hingga Honorer di Makassar Wajib Gunakan Ojek Online Setiap Hari Selasa Halaman 2 - Kompas.com"](http://kompas.com) Diakses pada tanggal 25 Juli 2023 Pukul 01.21 Wita

["Ojol Day Diberlakukan, Wali Kota Makassar Naik Ojek Online \(idntimes.com\)"](http://idntimes.com) Diakses pada tanggal 25 Juli 2023 Pukul 01.37 Wita.

LAMPIRAN

1. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 55 Tahun 2010/1 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Surat Edaran Walikota Makassar No. 551/377/S.Edar/BKPSMD/IX/2022 tentang Himbauan Penggunaan Jasa transportasi *online* (ojol) di lingkup pemerintah Kota Makassar

2. Surat Edaran Walikota No. 551/377/S.Edar/BKPSDMD/IX/2022 Tentang Himbauan Penggunaan Jasa Transportasi *Online* di Lingkup Pemerintah Kota Makassar



WALIKOTA MAKASSAR

Makassar, 15 September 2022

SURAT EDARAN

Nomor : 551/377/S.Edar/BKPSDMD/IX/2022

TENTANG HIMBAUAN PENGGUNAAN JASA TRANSPORTASI ONLINE (OJOL) DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2022 yang dipimpin langsung oleh WALIKOTA MAKASSAR yang antara lain membahas tentang pengendalian **Inflasi dan Pengurangan Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM)**, maka dihimbau kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Non Aparatur Sipil Negara (Laskar Pelangi) dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lingkup Pemerintah Kota Makassar, untuk :

1. Menginstal/mendownload Aplikasi penyedia jasa transportasi online (OJOL) di handphone masing-masing.
2. Setiap hari **Selasa** pada hari kerja agar menggunakan jasa transportasi online (OJOL) pada jam kerja baik itu menuju ke atau dari kantor maupun perihal operasional lainnya.
3. Melakukan swafoto selfie bersama pihak jasa transportasi online (OJOL) dengan memperlihatkan atribut Jaket/ID Card yang dikirimkan ke atasan langsung atau ke kepegawaian.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.



Tembusan Yth :

1. Wakil Walikota Makassar di Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar di Makassar;
3. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Arsip;